

Menurunkan Angka Kemiskinan Melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kabupaten Pandeglang

¹Viyulia, ²Arenawati, ³Agus Sjafari

^{1,2,3}Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Banten

Korespondensi : liaviyu@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apa itu program BSPS serta bagaimana pengaruhnya terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pandeglang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana dalam pengumpulan datanya menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan kajian pustaka. Lokasi penelitian ini yaitu pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pandeglang pada bidang Perumahan Kawasan Permukiman, serta penelitian juga dilakukan dengan mengamati langsung ke lapangan melihat lokasi rumah yang mendapat bantuan. Informan dalam penelitian ini yaitu pegawai DPKPP bidang Perumahan Kawasan Permukiman sebagai informan kunci, dan masyarakat penerima bantuan sebagai informan pendukung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program bantuan rumah swadaya memberikan pengaruh yang baik terhadap penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Pandeglang. Program BSPS adalah program yang disponsori pemerintah melalui kementerian PUPR yang diperuntukan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, yaitu mereka dengan penghasilan di bawah UMP. Program BSPS didanai dari tiga sumber pendanaan, antara lain APBN, APBD dan DAK. Masyarakat Pandeglang sangat terbantu untuk memiliki rumah yang layak huni melalui program BSPS ini, dan masyarakat berharap program BSPS ini terus diberikan oleh pemerintah guna untuk menurunkan angka kemiskinan serta mensejahterakan masyarakat dalam memenuhi haknya yaitu memiliki tempat tinggal yang layak huni.

Kata kunci: BSPS, Kemiskinan, Kesejahteraan

Abstract

The purpose of this research is to find out what the BSPS program is and how it affects poverty alleviation in Pandeglang Regency. The method used in this research is descriptive with a qualitative approach, in which data collection uses data collection techniques through observation, interviews, and literature review. The location of this research was at the Housing and Land Area Housing Agency of Pandeglang Regency in the area of Residential Housing, and the research was also carried out by observing directly in the field to see the location of the houses that received assistance. The informants in this study were DPKPP employees in the Residential Area Housing sector as key informants, and the beneficiary communities as supporting informants. The results of this study indicate that the self-help housing assistance program has had a good effect on reducing the poverty rate in Pandeglang Regency. The BSPS program is a government-sponsored program through the Ministry of PUPR which is intended for low-income people, namely those with income below the UMP. The BSPS program is funded from three funding sources, including the APBN, APBD and DAK. The people of Pandeglang are greatly helped to have livable homes through this BSPS program, and the community hopes that this BSPS program will continue to be provided by the government in order to reduce poverty and prosper the community in fulfilling their rights, namely to have a habitable place to live.

Keyword: BSPS, Poverty, welfare

1. PENDAHULUAN

Fenomena kemiskinan selalu menjadi sebuah topik yang menarik untuk menjadi bahan perbincangan, permasalahan terkait kemiskinan merupakan suatu permasalahan sosial yang selalu menjadi bahan untuk terus menerus di kaji (Armoyu, 2013). Kemiskinan masih menjadi masalah yang sering terjadi, terutama pada negara yang masih dalam status negara berkembang, Indonesia menjadi salah satunya negara dengan status tersebut. kemiskinan sebagai suatu keadaan dimana tidak memiliki keterjaminan dalam pendapatan, kebutuhan dasar yang kurang berkualitas, asset-aset produktif dan rendahnya kualitas perumahan, tidak mampu dalam memelihara Kesehatan yang baik, tidak adanya jaringan atau dukungan untuk mendapatkan hak nya dalam memiliki kehidupan yang layak, kurangnya infrastruktur dan keterpencilan. Negara di ASIA dengan penduduknya terpadat yaitu Indonesia menjadi salah satunya negara tersebut, dengan jumlah penduduknya yaitu 275.361.267 jiwa penduduk pada periode juni 2022 menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Pertumbuhan penduduk tiap tahunnya cenderung terus mengalami peningkatan, keadaan yang seperti itu akan menimbulkan ragam permasalahan. Teori Malthus mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang semakin pesat didalam suatu negara maka akan mengakibatkan timbulnya kemiskinan yang fatal, hal ini di sampaikan dalam (Todaro, 2006: 329) yang dikutip oleh (Kemiskinan & Indonesia, 2017). Kemiskinan dan kekurangan selalu tersembunyi dalam bayang-bayang orang, dan kemiskinan dapat dikatakan sebagai masalah sosial global. Rasa kemiskinan terasa saat membandingkan kehidupan orang lain yang termasuk dalam kategori berpenghasilan tinggi. Kemiskinan selalu menjadi permasalahan yang utama bagi banyaknya negara di dunia, terutama permasalahan bagi negara yang sedang dalam tahap berkembang.

Kemiskinan menurut (Arifin, 2009:5-6) dalam (Nazaruddim et al., 2017). Berasal dari kata sederhana yang berarti mampu bekerja dan berusaha, akan tetapi dalam pemenuhan kebutuhan sehari-harinya tidak mencukupi. Kemiskinan adalah kekurangan dari apa yang biasanya Anda miliki, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan air. Ini terkait dengan kualitas hidup. Tidak memiliki akses dalam mendapatkan pendidikan ataupun pekerjaan untuk mengatasi kemiskinan dan juga mendapatkan kehrmatan sebagai warga negara, termasuk juga dalam kemiskinan. Kemiskinan menjadi persoalan yang di hadapi oleh negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan memiliki banyak segi dan kebutuhan manusia bervariasi, jadi tidak hanya dimensi primer seperti kaya dan miskin, pengetahuan serta keterampilan, organisasi sosial dan politik, tetapi juga kekurangan dalam hal lain seperti buruknya jaringan sosial, tidak adanya sumber daya keuangan dan juga tidak dapatnya informasi.

Kemiskinan juga mencakup beberapa dimensi dari sudut pandang politik, ekonomi serta psikososial (Ellis, 1984). Kemiskinan dalam aspek ekonomi bisa diartikan menjadi kekurangan asal daya yang bisa untuk dipakai memenuhi kebutuhan hayati dan mempertinggi kesejahteraan manusia. Sumber daya dalam konteks ini tidak hanya mencakup aspek finansial, tetapi segala macam aset yang dapat meningkatkan kesejahteraan secara umum. Melalui konsep ini maka pengukuran kemiskinan dapat secara langsung dengan menentukan sumber daya yang tersedia terhadap suatu standar yang disebut dengan garis kemiskinan. Metode seperti ini sering juga disebut dengan pengukuran kemiskinan yang bersifat absolut. Kemiskinan absolut dapat di definisikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup dan juga pekerjaan, seperti makanan, pakaian, Kesehatan dan juga Pendidikan. Kebutuhan dasar minimum diterjemahkan ke dalam ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai yang diperoleh dengan mengubah kebutuhan minimum menjadi kebutuhan dasar disebut garis kemiskinan. Garis kemiskinan diukur dengan tingkat pendapatan yang diperoleh selama periode waktu tertentu dan dapat digolongkan miskin apabila pendapatan tersebut berada di bawah ambang batas yang ditentukan. (Tursilarini & Udiati, 2020).

Menurut (Sari et al., 2022) ada beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan, antara lain:

- 1) Laju Pertumbuhan Penduduk Yang Tinggi
Dengan meningkatnya angka kelahiran yang tinggi, sehingga hal itu mengakibatkan pertumbuhan penduduk semakin besar dan berdampak pada keterbatasan lapangan pekerjaan.
- 2) Masyarakat Pengangguran
Keterbatasan lapangan pekerjaan akibat laju pertumbuhan penduduk yang pesat, akhirnya berdampak pada meningkatnya angka pengangguran.
- 3) Rendahnya Pendidikan
Keterbatasan penduduk karena kurangnya wawasan dan tidak memiliki keterampilan yang disebabkan oleh rendahnya Pendidikan, sehingga kalah saing dengan penduduk yang memiliki Pendidikan yang tinggi. Hal ini menjadi faktor dari meningkatnya angka pengangguran serta meningkatnya angka kemiskinan.
- 4) Bencana Alam
Masyarakat yang terdampak bencana alam, mereka akan kehilangan harta benda nya. Faktor ini sulit dan tidak bisa untuk kita dihindari. Karena kita tidak mengetahui dan tidak bisa memprediksi kapan datangnya bencana tersebut.
- 5) Tidak Meratanya Distribusi Pendapatan
Masyarakat yang memiliki sumber daya yang terbatas serta rendah, maka umumnya akan berada dibawah garis angka kemiskinan.

Pemerintah menjadikan kemiskinan sebagai prioritas. Karena dampaknya sangat luas. Kemiskinan mempengaruhi kualitas hidup, menghambat pengembangan sumber daya manusia yang unggul, membebani sosial ekonomi masyarakat, meningkatkan kejahatan, dan mempengaruhi keselamatan publik. Dampak yang terjadi Ketika penduduk berada dalam garis kemiskinan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Angka kriminalitas di daerah menjadi meningkat.
Hal ini disebabkan karena masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pokoknya menggunakan cara yang instan, dengan cara apapun termasuk dengan melakukan Tindakan kriminalitas seperti mencuri.
- 2) Meningkatnya angka kematian
yang disebabkan karena masyarakat yang berada dalam kondisi miskin akan sulit untuk mendapatkan akses Kesehatan, sehingga hal ini berdampak pada masyarakat yang sakit membutuhkan pengobatan namun tidak bisa mendapatkannya dan menyebabkan angka kematian meningkat.
- 3) Akses dalam mendapatkan Pendidikan.
Masyarakat yang miskin akan kesulitan untuk mendapatkan akses Pendidikan, karena mereka tidak mampu untuk membayar biaya Pendidikan, selain itu juga mereka tidak mampu untuk membeli kebutuhan sekolah seperti baju seragam sekolah dan alat tulis. Sehingga hal ini dapat meningkatkan juga kemiskinan di suatu negara maupun daerah.
- 4) Meningkatnya angka pengangguran
Masyarakat miskin dengan latar Pendidikan yang rendah maka akan sulit bersaing bagi mereka yang pendidikannya tinggi sehingga hal ini memicu peningkatan angka pengangguran yang disebabkan karena kemiskinan.
- 5) Konflik antar masyarakat
Kesenjangan sosial dalam masyarakat menjadi pemicu konflik dalam kehidupan antar masyarakat karena adanya kecemburuan antar tingkat ekonomi masyarakat.

Dalam kehidupannya, manusia tidak pernah terlepas dari hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Bagi manusia kebutuhan akan tempat tinggal merupakan kebutuhan pokok bersama dengan sandang dan pangan, namun masih terdapat banyak masyarakat yang belum memenuhi kebutuhan tersebut. (Negara et al., 2019). Badan Pusat Statistik (BPS) mengumpulkan data terkait kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan Survei Ekonomi Negara 2022. Berdasarkan data tersebut, jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebanyak 26161 orang, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 16 orang, dan jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten sebanyak 16 orang. pada Maret 2022 berada pada angka 814,02 jiwa penduduk miskin atau sekitar 6,16 % sedangkan kabupaten pandeglang berada dalam peringkat 4 dengan Kabupaten yang masih tinggi persentase penduduk miskinnya yaitu pada tahun 2022 sebesar 114,65 atau sekitar 9,42% penduduk miskin dari jumlah penduduk masyarakat pandeglang sebanyak 1,288,314,00 jiwa penduduk (Sumber: bps.go.id). Pandeglang menjadi salah satu daerah di Provinsi dengan persentase penduduk miskinnya yang masih cukup tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Banten. baik di perkotaan maupun pedesaan. Berbagai berita terkait kemiskinan di kabupaten pandeglang berseliweran di media masa, karena tinggi nya angka kemiskinan di kabupaten pandeglang bahkan menjadi kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi di provinsi banten dan di kategorikan sebagai kabupaten yang teretinggal. Berita dari ANTARA Banten, mengatakan bahwa pada tahun 2011 penduduk miskin di pandeglang sekitar 138.004 jiwa atau jika di persentasikan yaitu 12,01 % dari total penduduk kabupaten pandeglang 1,2 juta jiwa. Pada saat itu kabupaten pandeglang yang di pimpin oleh Erwan Kurtubi selaku Bupati Pandeglang mengatakan bahwa angka kemiskinan di kabupaten Pandeglang masih relative tinggi, namun pemerintah selalu berupaya untuk menurunkan angka tersebut dengan berbagai programnya. Pada tahun 2010 pandeglang mendapatkan bantuan program PKH (Program Keluarga Harapan) dari Kementrian Sosial sebesar 22 milyar untuk 17.300 KK keluarga miskin (banten.antaranews.com di akses pada 3 januari 2023 pukul 9:58)

Potret kemiskinan di kabupaten pandeglang yang sangat tinggi ini pada akhirnya menjadi julukan kabupaten tertinggal, karna banyaknya rumah yang kumuh, jalanan yang kumuh tidak enak di pandang, banyaknya pengangguran atau gelandangan. Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 653 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pandeglang, masih terdapat banyak wilayah kumuh dengan total 96 desa dalam 27 kecamatan, dengan jumlah luas seluruh wilayah kumuh di kabupaten pandeglang 1.051.99 (Ha) dengan wilayah kumuh terluas berada di daerah Mekarsari Cibaling yaitu 29,19 Ha dan wilayah kumuh terkecil berada di daerah Rancateureup Labuan yaitu seluas 1 Ha (Keputusan Bupati Nomor 653 Tahun 2021).

Masalah rumah tidak layak huni harus diperhatikan demi mewujudkan kehidupan yang berkecukupan. Tidak mungkin menjalani kehidupan yang layak tanpa tempat yang layak. Kehidupan seseorang akan lebih baik serta sehat jasmani maupun rohaninya jika mendapatkan kenyamanan dalam hidupnya. Dalam hal ini tempat tinggal menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup dan hak bagi masyarakat untuk dapat memiliki tempat tinggal. Sehingga rumah wajib untuk dijadikan sebagai tempat yang layak huni dan diperlukan program pemerintah untuk mengatasi masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni agar dapat memiliki rumah yang layak huni. Untuk meningkatkan penyediaan perumahan, perlu dibangun sistem penyediaan perumahan yang sesuai secara kualitatif dan kuantitatif bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Bebas dari belenggu kemiskinan adalah tujuan tertinggi dari semua pembangunan. bahkan dalam menghadapi perjuangan panjang negara Indonesia merdeka selama 77 tahun (Bukhari, 2021). Pengentasan kemiskinan merupakan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005-2025). Hal ini sejalan dengan Agenda Pembangunan Milenium, sebuah deklarasi yang diadopsi oleh 189 negara menyusul pengesahan 147 kepala negara dan pemerintahan pada KTT Pembangunan Milenium

September 2000 di New York. Deklarasi ini bertajuk “Millennium Development Goals”. Goals - MDGs terdiri dari 8 tujuan. (1) Mengakhiri kemiskinan ekstrim. (2) Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua. (3) Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (4) Menurunkan angka kematian bayi. (5) Meningkatkan kesehatan ibu hamil. (6) Pencegahan HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya. (7) Menjamin kelestarian lingkungan. (8) Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan (Arifin, 2020).

Pemerintah baik pusat maupun daerah, selalu memikirkan bagaimana menurunkan angka kemiskinan melalui program-program nya untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat serta menurunkan angka kemiskinan di kabupaten pandeglang. Karena keberhasilan suatu daerah serta keberhasilan suatu pemerintahan di katakana berhasil apabila masyarakat dalam daerahnya merasakan kesejahteraan melalui program-program pemerintahnya, dengan melibatkan berbagai sektor dalam peningkatan kesejahteraan akan meningkatkan keberhasilan program pemerintah (Saputra, T dkk, 2023).

Menurut Friedlander (1961) kesejahteraan dianggap sebagai keadaan yang lebih baik. Perlindungan sosial didefinisikan sebagai sistem terorganisir dari organisasi dan layanan sosial yang dirancang untuk membantu individu atau kelompok mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih baik. (Nurohman et al., 2019) Sedangkan kesejahteraan masyarakat menurut (Zaman Nur. dkk, 2021) Dengan kata lain, kebahagiaan dalam hidup adalah siklus yang melibatkan berbagai perubahan dalam aspek dasar kehidupan manusia, yang tidak mengarah pada kondisi yang lebih baik dalam kelompok sosial, gaya hidup, dan hubungan sosial. Definisi lain yang di kemukakan oleh Todaro Dan Stephen C. Smith (2006) dalam (Nartin & Musin, 2022) Kesejahteraan sosial berarti kesejahteraan dasar, yang dibuktikan dengan perumahan yang layak, kecukupan kebutuhan sandang (sandang) dan pangan (pangan), pendidikan dan kesehatan, atau kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kepentingannya yang sebesar-besarnya. kebutuhan terpenuhi. Mengingat tingkat kendala anggaran dan kondisi di mana kebutuhan fisik dan mental terpenuhi. Sedangkan menurut Zastrow (2000) dan Badrudin (2012) dalam (Zaman Nur. dkk, 2021) Kesejahteraan sosial adalah sistem program dan layanan yang membantu orang memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), perlindungan sosial mengacu pada pelayanan sosial yang diselenggarakan yang ditujukan untuk membantu individu atau masyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraannya, sesuai dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Aktivitas, Juga kemaslahatan komunal adalah keadaan yang menunjukkan kondisi kehidupan masyarakat, yang dapat dilihat dari taraf hidup mereka. Untuk mengetahui taraf hidup dan keadaan kegiatan sosial ekonomi rumah tangga dan masyarakat saat ini, maka struktur kegiatan ekonomi menurut sektor menjadi dasar bagi kegiatan produktif rumah tangga dan masyarakat. Masyarakat lokal, potensi lokal (sumber daya alam, kegiatan produktif, dll), lingkungan dan infrastruktur yang mempengaruhi pembangunan struktur nasional, dan kondisi kelembagaan yang membentuknya. Jaringan produksi dan pemasaran di tingkat lokal, regional dan global. (Endra Gunawan, 2021)

Kabupaten Pandeglang melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki program unggulannya sesuai dengan visi misi kepala daerah terpilih dalam menurunkan angka kemiskinan di kabupaten pandeglang guna untuk mensejahterakan masyarakat pandeglang. Karena sebaran perumahan maupun daerah kumuh di kabupaten pandeglang masih relative luas berdasarkan Keputusan Bupati tentang penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Pandeglang. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Daftar Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh
Kabupaten Pandeglang 2021

No.	Kecamatan	Luas Kumuh (Ha)
1	Angsana	27,25
2	Cadasari	6,2
3	Carita	87,78
4	Cibitug	23
5	Cibaliung	55,13
6	Cigeulis	64,73
7	Cikedal	3,6
8	Cikeusik	23,5
9	Cimanggu	65,09
10	Cipeucang	8,09
11	Cisata	19,51
12	Jiput	5
13	Karang Tanjung	27,47
14	Koroncong	3,1
15	Labuan	49,66
16	Manjasari	20,38
17	Mandalawangi	69,5
18	Mekarjaya	27,5
19	Menes	3,3
20	Munjul	34,18
21	Pagelaran	29,3
22	Pandeglang	46,62
23	Panimbang	54,05
24	Patia	135,3
25	Picung	21,22
26	Pulosari	10,26
27	Saketi	3,92
28	Sindang Resmi	21,32
29	Sobang	39,51
30	Sukaresmi	21,11
31	Sumur	45,41
JUMLAH		1051,99

Program bantuan tersebut menjadi program nasional yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Salah satu program bantuan utama DPKPP adalah Bantuan Stimulan Swadaya (BSPS) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Bantuan Stimulan Swadaya (BSPS) dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 07 Tahun 2018 tentang Stimulan Bantuan Swadaya Perumahan (BSPS). Bantuan yang diberikan berupa sarana perbaikan rumah/penambah rumah untuk meningkatkan/memenuhi kebutuhan rumah layak huni. Kabupaten Pandeglang memutuskan untuk melaksanakan salah satu daerah penerima bantuan tersebut berdasarkan Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Tugas Pemerintah Negara Bagian/Kota di Bidang Stimulator Perumahan Swadaya yang diterbitkan kepada Bupati dan Walikota se-Indonesia. Insentif bagi program swadaya di Kabupaten Pandeglang diberikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Program tersebut dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat untuk mempercepat pembangunan daerah untuk kepentingan daerah dan warganya dengan memfasilitasi pelaksanaan proses perencanaan dan pembangunan yang melibatkan masyarakat melalui gotong royong dan dukungan masyarakat. meningkatkan.

Hal ini juga berkaitan dengan efektivitas dari kinerja para pegawai DPKPP Pandeglang dalam merealisasikan program tersebut agar dapat mencapai target sesuai dengan capaian target yang telah ditentukan sebelumnya.

Tujuan dari penelitian ini yaitu,

1. Guna mengetahui apa itu program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
2. Apakah ada pengaruhnya program BSPS terhadap penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Pandeglang

2. METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Menurut (Moleong, 2010) informasi dibuat dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berupa data deskriptif. Data deskriptif adalah data yang berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Sedangkan menurut (Fahlevi & Ananta, Reza, 2015) penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman seluas mungkin tentang subyek yang dipelajari pada saat penelitian. Penelitian kualitatif digunakan sebagai teknis penelitian yang menghasilkan data deskriptif atau deskriptif tentang orang atau perilaku, sebagai data deskriptif yang dapat dilihat, dianalisis, dan dijawab secara kolektif berdasarkan dimensi yang disajikan oleh peneliti. Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui observasi dan dokumentasi.

Lokasi survei pada kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pandeglang dan survei juga dilakukan pada penerima BSPS di Desa Bojongsari. Waktu penelitian dilakukan selama satu bulan pada bulan Desember 2022. Informan dalam penelitian ini adalah pegawai DPKPP Kabupaten Pandeglang sebagai informan kunci, dan informan pendukungnya yaitu penerima BSPS. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik wawancara dengan menggunakan teknik analisis data yang mengacu pada model interaktif yang dicetuskan oleh Miles dan Huberman. Miles dan Huberman yang dikutip serta diterjemahkan oleh Sugiyono (2010:426) yang menjelaskan bahwa dalam teknik analisis data memiliki empat langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Akar masalah yang kita lihat dalam penyebab kemiskinan dapat diidentifikasi sebagai kemiskinan, yang kita kenal sebagai kemiskinan subyektif, kemiskinan absolut, kemiskinan relative, kemiskinan alami, kemiskinan budaya dan kemiskinan struktural.

1. Kemiskinan subyektif adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kenyataan bahwa seseorang percaya bahwa kebutuhannya tidak terpenuhi.
2. Kemiskinan Absolut adalah kemiskinan yang disebabkan karena pendapatan seseorang atau keluarga dibawah standar yang ditetapkan, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
3. Kemiskinan Relativ adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kebijakan pembangunan yang belum menyentuh semua sektor masyarakat, sehingga pengangguran dan kesempatan kerja tidak seimbang.
4. Kemiskinan Alami adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya alam disekitar tempat tinggalnya.
5. Kemiskinan Budaya adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kebiasaan masyarakat, yang tidak ingin meningkatkan taraf hidup seperti masyarakat modern.
6. Kemiskinan Struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh sekelompok orang yang tidak dapat menggunakan sumber-sumber pendapatan yang tersedia.

Kabupaten pandeglang adalah sebuah kabupaten yang berada di provinsi Banten dengan Pandeglang sebagai Ibu Kotanya dan terdapat 35 kecamatan dengan terbagi kedalam 13 kelurahan dan 326 desa. Berdasarkan SK Kumuh dalam Keputusan Bupati Nomor 653 tahun 2021 luas daerah kumuh di kabupaten pandeglang masih cukup tinggi yaitu 1.051.99 Ha. Begitupun dengan angka kemiskinan

di kabupaten pandeglang masih tinggi . beragam upaya pemerintah melalui program nya baik yang dicanangkan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam mensejahterakan masyarakat guna menurunkan angka kemiskinan. Hal ini yang mendasari pembangunan rumah tidak layak huni agar menjadi rumah yang layak huni. Hal ini juga sejalan dengan komitmen, visi dan misi kepala daerah terpilih yang merupakan Bupati Kabupaten Pandeglan melalui Dinas Pertanahan Perumahan dan Permukiman (DPKPP) Kabupaten Pandeglan melalui program BSPS.

Apa Itu Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Program BSPS merupakan bantuan bagi masyarakat dengan penghasilan rendah (MBR) dengan pendapatan di bawah UMP kabupaten Pandeglang. agar memiliki hunian yang nyaman dan menjadi tempat layak huni. program BSPS ini perlu kesadaran masyarakat juga untuk mendukung terselenggaranya program tersebut dengan berpartisipasi membantu untuk gotongroyong dalam proses pelaksanaannya. ada dua jenis dalam program BSPS ini yaitu yang pertama PKRS atau peningkatan kualitas, artinya rumah yang sudah ada namun dalam kondisi yang kurang layak huni, melalui program BSPS di perbaiki atau di renovasi sedangkan untuk jenis bantuan BSPS yang kedua yaitu PBRS atau pembangunan baru, yang artinya kondisi rumah yang sangat parah dan tidak bisa jika hanya di renovasi saja, oleh karena itu perlu untuk di bubar dan dibuatkan rumah baru.

Prinsip dukungan stimulan swadaya meliputi:

1. Masyarakat sebagai pemeran utama
2. Dukungan pemerintah untuk kepentingan masyarakat
3. Memanfaatkan kemandirian masyarakat
4. Gotong royong dan berkelanjutan
5. moderator komunitas
6. Tidak dipungut biaya
7. Penerbitan rumah layak huni
8. Di laksanakan pada tahun anggaran berjalan
9. Hak Yang Dicakup, Prosedur, Waktu, Penggunaan dan Pertanggungjawaban

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2016 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sebagaimana telah diubah menjadi PERMEN Nomor 07/PRT/M/2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, bentuk bantuan BSPS dibagi kedalam dua jenis bentuk bantuan yaitu berupa uang dan berupa barang. Untuk jenis uang, dipergunakan untuk bahan bangunan dan upah kerja (khusus untuk penerima bantuan dengan status lansia dan disabilitas) sedangkan jenis bantuan yang kedua yaitu berupa barang diberikan kepada perseorangan atau penerima bantuan berupa barang bangunan dengan bantuan masyarakat atau anggota keluarganya untuk membantu pengerjaan rumah. Besarana bantuan BSPS yaitu 17,5 jt (bahan material) yang bersumber dari APBD, 20 jt yang bersumber dari APBN dan 35 jt yang bersumber dari DAK (32,5 jt bahan material dan 2,5 jt upah kerja)

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf bidang perumahan permukiman, mengatakan bahwa penyaluran bantuan dari sumber DAK dan APBD langsung masuk kedalam rekening atas nama penerima bantuan, untuk mekanisme nya di pantau pengeluaran uang tersebut agar tepat guna, dengan di damping tenaga fasilitator lapangan dan pembelian bahan bangunan kepada matrial yang telah di tunjuk oleh pihak pemerintah. Pemerintah daerah khususnya dalam hal ini DPKPP Pandeglang selalu berusaha untuk dapat meningkatkan alokasi program bantuan tersebut agar semakin banyak masyarakat mendapat bantuan BSPS.

Adapun yang menjadi kriteria bagi penerima bantuan yaitu:

1. WNI yang sudah memiliki keluarga

2. Memiliki tanah dengan hak yang sah atau kepemilikan sendiri dengan di buktikan oleh surat-surat (tidak dalam sengketa, lokasi tanah sesuai tata ruang wilayah)
3. Menempati satu-satunya rumah tidka layak huni
4. Belum pernah menerima bantuan program perumahan
5. Penghasilan dibawah Upah Minimum Provinsi (UMP)

Penurunan Angka Kemiskinan di Kabupaten Pandeglang Melalui Program BSPS

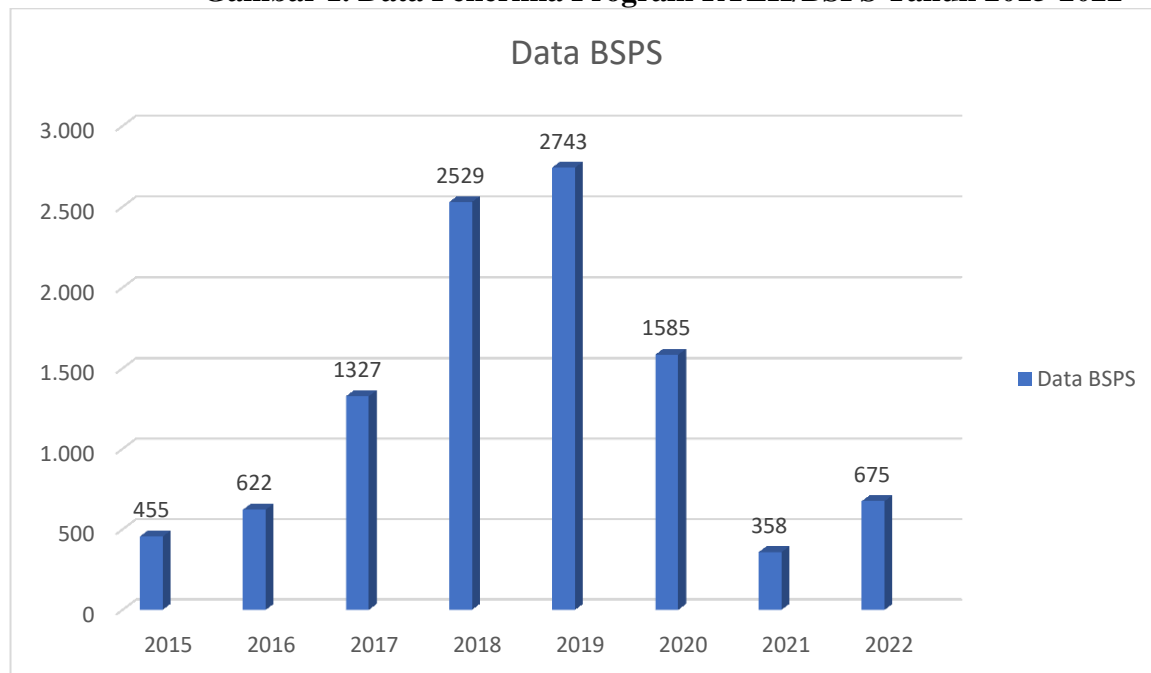
Rumah yang dibangun sendiri disebut dengan rumah swadaya, yaitu rumah yang dibangun atas prakarsa dan usaha masyarakat. Rumah swadaya adalah kumpulan rumah mandiri sebagai bagian dari rumah listrik perkotaan dan pedesaan yang diberikan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) berdasarkan Peraturan Menteri PUPR (PerMen PUPR /7/PRT/M/2018). Dengan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebuah program peningkatan kualitas bangunan dan perumahan, program ini mempengaruhi kualitas bangunan, terutama kondisi masyarakat yang terkena dampak yang tidak memiliki rumah layak huni. selain itu, program ini juga memberikan dampak terhadap sosial ekonomi masyarakat.



Gambar 1. Pra dan Pasca Konstruksi Bangunan Program BSPS

Gambar di atas adalah dokumentasi program bantuan BSPS yang di terima oleh Bapak Moch Malik di daerah Kp Bojongsari dengan jumlah bantuan yang di terima sebesar Rp 17.5 jt yang bersumber dari APBD. Program BSPS ini sangat membantu masyarakat Pandeglang untuk memiliki hunian yang layak terutama bagi mereka yang memiliki penghasilan rendah. Tidak hanya itu, Program BSPS ini juga dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian sekaligus menjaga Kesehatan masyarakat. Salah seorang penerima bantuan BSPS mengaku sangat terbantu dengan adanya program bedah rumah atau BSPS ini. “ saya harap pemerintah bisa melanjutkan program BSPS ini, sebab manfaatnya sangat kami rasakan dan rrumah tempat tinggal kami lebih layak huni” ujar Pak Malik saat di temui di tempat kediamannya.

Program BSPS ini atau yang sebelumnya adalah program bedah rumah bagi rumah tidak layak huni, sudah ada sejak tahun 2015 hingga saat ini masih menjadi program yang slalu di harapkan oleh masyarakat. Ini membuktikan konsistennya pemerintah baik pusat maupun daerah dalam pengentasan kemiskinan guna mensejahterakan masyarakat serta memberikan tempat tinggal yang layak.

Gambar 1. Data Penerima Program RTLH/BSPS Tahun 2015-2022

Sumber: SubBagian Tata Usaha DPKPP, 2022

Dapat dilihat pada tabel di atas, program bedah rumah atau yang sekarang disebut dengan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari tahun 2015 terus mengalami peningkatan yang signifikan hingga tahun 2019, namun pada tahun 2020 hingga tahun 2021 mengalami penurunan, hal itu disebabkan karena pada akhir tahun 2019 dunia terserang virus covid19 sehingga berdampak pada segala aspek hingga pembangunan daerah pun mengalami dampaknya, sehingga dana yang semula untuk program pembangunan rumah swadaya, akhirnya harus terbagi untuk penanganan covid19. Namun pemerintah tetap konsisten dalam pengentasan kemiskinan di kabupaten pandeglang dalam hal penangan Kawasan kumuh atau rumah-rumah yang kumuh tidak layak huni. hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan yang semula pada tahun 2021 hanya sebanyak 358 rumah yang mendapat program bantuan tersebut namun pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan walaupun belum secara pesat. Namun hal itu menjadi komitmen pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan di kabupaten pandeglang agar pandeglang menjadi sejahtera dan Kawasan kumuh menjadi berkurang bahkan tidak ada lagi masyarakat yang tidak memiliki tempat tinggal layak.

Walaupun mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021 namun tetap memberikan dampak yang positif, yaitu angka kemiskinan dengan kondisi rumah kumuh semakin menurun. Dan ini menjadi pengaruh yang sangat positif dari program BSPS tersebut terhadap penurunan angka kemiskinan di kabupaten pandeglang. Hal tersebut dapat peneliti lihat langsung dilapangan Ketika berkunjung dan mengamati daerah-daerah yang semula menjadi Kawasan dengan rumah-rumah kumuh yang banyak, namun semenjak adanya bantuan program tersebut rumah-rumah kumuh itu menjadi rumah yang layak huni. hal itu menunjukkan bahwa program BSPS tersebut benar-benar sangat berdampak positif bagi masyarakat

4. KESIMPULAN

Hasil dari penelitian yang telah diuraikan didalam pembahasan, Maka penulis memberikan kesimpulan bahwa kemiskinan menjadi hal yang selalu diperbincangkan. Kemiskinan selalu menjadi prioritas pemerintah dalam setiap programnya. baik pusat maupun daerah selalu mencari solusi untuk mengentaskan kemiskinan. Pemerintah menawarkan berbagai program untuk kepentingan masyarakat, salah satunya program BSPS-nya. penurunan angka kemiskinan di kabupaten pandeglang mengalami penurunan yang signifikan melalui program BSPS tersebut, namun pada tahun 2020 realisasi program tersebut mengalami penurunan sehingga rumah yang mendapat bantuan hanya sedikit, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya karena disebabkan oleh adanya virus covid 19 yang melanda Indonesia sehingga hal tersebut berdampak pada alokasi anggaran yang semula untuk program BSPS akhirnya di refocusing untuk penanganan covid19. Program BSPS merupakan program dukungan stimulan swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang didanai dari tiga sumber pendanaan, antara lain: APBN, APBD, dan DAK. Pembiayaan per orang atau penerima bantuan sebesar 17,5 juta dari APBD, 35 juta dari APBN dan 20 juta dari DAK. Program BSPS menemukan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Pandeglang masih tinggi dan permukiman kumuh di Kabupaten Pandeglang masih cukup tinggi dan cukup besar. Dukungan program BSPS sangat berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Pandeglang.

5. SARAN

Program BSPS ini masih menjadi hal yang kurang familiar di masyarakat khususnya kabupaten pandeglang. walaupun program ini sudah lama ada nya, dan sebelumnya program tersebut dinamakan Program Bedah Rumah atau RTLH. Namun masyarakat masih belum memahami apa itu program BSPS dan diperuntukan untuk siapa. Masyarakat hanya sebatas mengetahui bahwa program BSPS untuk masyarakat yang tidak mampu, namun mereka tidak mengetahui kategori masyarakat yang tidak mampu seperti apa yang layak mendapatkan bantuan BSPS tersebut sehingga banyak terjadinya kecemburuan sosial di masyarakat. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah dalam mensosialisasikan program tersebut secara jelas dan dapat difahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

1. Pemerintah khususnya pusat agar memberikan alokasi anggaran program BSPS lebih besar, karena jika bantuan tersebut dengan penggunaan dana dari daerah (APBD) dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki daerah, maka akan terbatas untuk alokasi pembangunannya. Terutama di kabupaten pandeglang dengan sumber daya manusia dan sumber daya alam nya yang terbatas maka pendapatan daerahnya pun terbatas. Selain itu, pemerintah agar membentuk panitia atau unsur terkait dalam realisasi program tersebut secara baik dan transparansi.
2. Peneliti berharap dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya tentang program perbaikan gizi masyarakat kategori balita berstatus *stunting* dengan melihat dari hasil program inovasi yang sudah peneliti temukan sehingga tujuan dari pemerintah Indonesia bebas *stunting* tahun 2045 dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Arifin, J. (2020). Budaya Kemiskinan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia. *Sosio Informa*, 6(2). <https://doi.org/10.33007/inf.v6i2.2372>

- [2]. Armoyu, H. M. (2013). Pemberdayaan Pendidikan Islam Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan. *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, 11(2), 233. <https://doi.org/10.21154/cendekia.v11i2.278>
- [3]. Endra Gunawan, dkk. (2021). Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi. -, 30–32.
- [4]. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=XSU5EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA30&dq=bab+2+kesejahteraan+masyarakat&ots=ysqsGmsk7&sig=d40L2FmVt4BIRQOXBPl3QBHkK0&redir_esc=y#v=onepage&q=bab 2 kesejahteraan masyarakat&f=false
- [5]. Fahlevi, H., & Ananta, Reza, M. (2015). Analisis efisiensi dan efektivitas anggaran belanja langsung di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 2(1), 58–67.
- [6]. Kemiskinan, D., & Indonesia, D. I. (2017). Determinan Kemiskinan Di Indonesia Tahun 1982-2012. *Economics Development Analysis Journal*, 4(1), 58–64.
- [7]. Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pt Remaja Rosdakarya.
- [8]. Nartin, N., & Musin, Y. (2022). PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DIMASA PANDEMI COVID-19 (Studi Pada Kantor Camat Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan). *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(3), 163–172. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i3.23>
- [9]. Nazaruddim, A., Mudjib, M., & Muafiqie, H. (2017). Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Jombang. *Journal of Public Power*, 1(1), 16–39.
- [10]. Negara, J. A., Padang, U. N., Barat, A. T., Negara, J. A., Padang, U. N., Barat, A. T., Negara, J. A., Padang, U. N., & Barat, A. T. (2019). (*Rtlh*) Di Kelurahan Aie Pacah. 3, 272–279.
- [11]. Nurohman, Y. A., Qurniawati, R. S., & Hasyim, F. (2019). Dana Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Wisata Menggoro. *Magisma: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 7(1), 35–43. <https://doi.org/10.35829/magisma.v7i1.38>
- [12]. Sari, W., Prayendi, D. A., Aulia, R. G., Idzni, H., Yunus, S. M., Dwijaya, R., & Rachmalija, S. (2022). Kebijakan Anti Kemiskinan Program Pemerintah dalam Penaggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 4(1), 1–10.
- [13]. Saputra, T., Zuhdi, S., Kusumawardhani, F., & Novaria, R. (2023). The Effect of Economic Development on Illegal Gold Mining in Kuantan Singingi, Indonesia. *Journal of Governance*, 8(1).

-
- [14]. Tursilarini, T. Y., & Udiati, T. (2020). Dampak Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Kesejahteraan Sosial Keluarga Penerima Manfaat di kabupaten Bangka. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 44(1), 1–21.
- [15]. <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/mediainformasi/article/view/1973/pdf>
- [16]. Zaman Nur. dkk. (2021). *Sumber Daya dan Kesejahteraan Masyarakat*. Yayasan Kita Menulis.